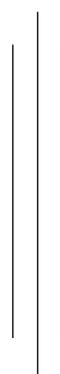


# **TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL TAHUN 2024**



**KECAMATAN BUAYAN  
KABUPATEN KEBUMEN**

**MATRIK TINDAK LANJUT AKIP INTERNAL  
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2024**

No.	Temuan	Rekomendasi	TindakLanjut	Keterangan
1.	Penyusunan perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam Pohon Kinerja	Menyusun perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan dengan membuat Pohon Kinerja	Telah disusun Pohon Kinerja	Terlampir
2.	Telah mempunyai rumusan formulasi pengukuran indicator kinerja namun belum terdapat mekanisme dan prosedur yang handal dalam rangka pengumpulan data kinerja.	Membuat mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP.	Telah disusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data	Terlampir
3.	Informasi dalam laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun sebelumnya selama 3 tahun.	Menyusun Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana dalam BAB III agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya selama 3 tahun.	BAB III Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya selama 3 tahun.	Terlampir
4.	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindak lanjuti, namun informasi atas tindak lanjut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja.	Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Buayan Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan).	Berita Acara Tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	Terlampir



**KAMAT BUAYAN**

**NUR WAHYUDI, S.H**

Pembina IV/a

NP. 198001102011011006

**DATA DUKUNG TINDAK LANJUT  
POINT 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN BUAYAN**

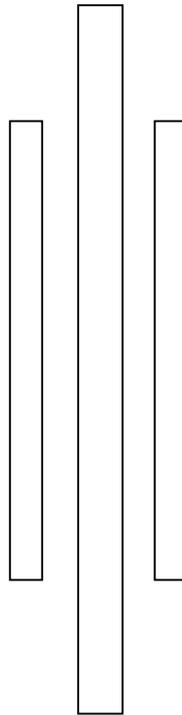
Jalan Karangbolong No.59 Buayan Tlp.(0287) 472190 Pos 54474

Email : [pelayanankecbuayan@gmail.com](mailto:pelayanankecbuayan@gmail.com)

Website : <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>

---

# POHON KINERJA



**KECAMATAN BUAYAN  
KABUPATEN KEBUMEN**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1. Informasi / Data tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Tujuan jangka menengah Kecamatan Buayan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,5 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 86.

Sedangkan sasaran jangka menengah Kecamatan Buayan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat sebesar 82,5 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai atau indeks kepuasan masyarakat sebesar 87.

### **2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Buayan, adalah Kualitas Pelayanan Publik belum Optimal. Tuntutan Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik. Secara umum kondisi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini terlihat bahwa masih ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal diantaranya standarisasi pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Untuk itu perlu keselarasan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## 1. POHON KINERJA

### 3.1. Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

#### 3.1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Dengan meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

### 3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*)

Outcome (Sasaran OPD)	CSF (Sasaran Program)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Buayan
	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri
Meningkatnya kompetensi ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN (Crosscutting dengan BKPSDM)
Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan Pembangunan daerah (Crosscutting dengan BAPPEDA)

### 3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

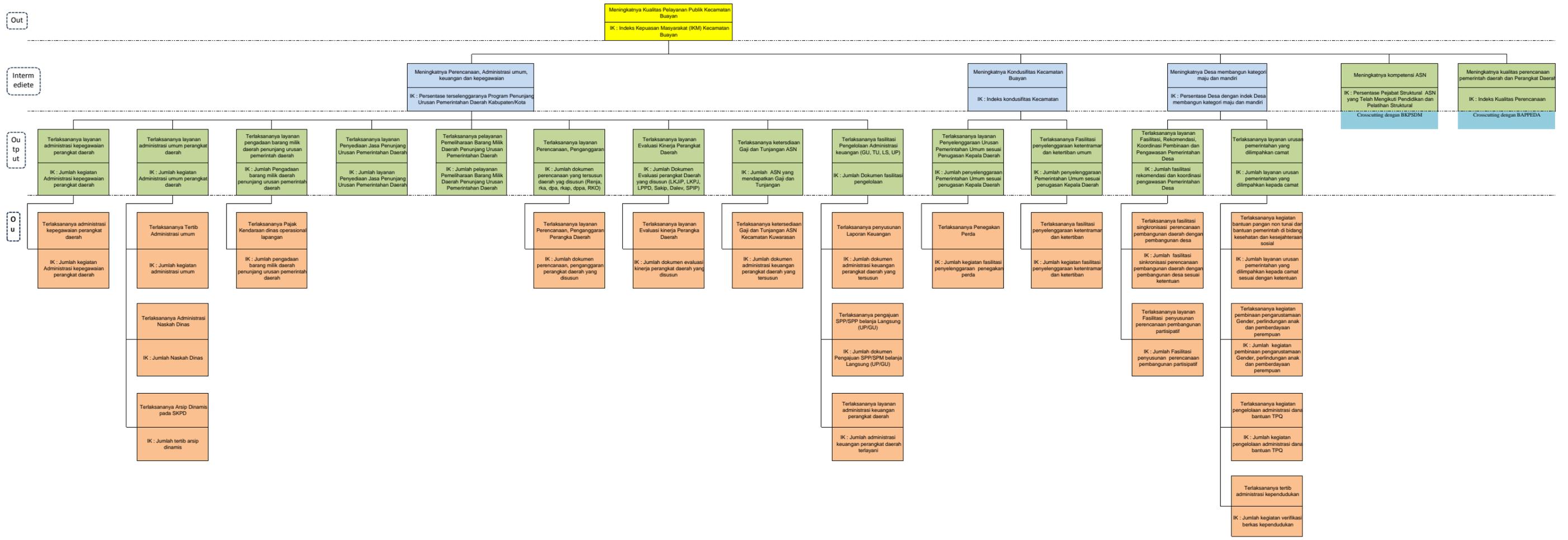
CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN (sasaran kegiatan)
Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah
	Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya layanan Perencanaan, Penganggaran
	Terlaksananya layanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terlaksananya ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Administrasi keuangan (GU, TU, LS, UP)
Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Buayan	Terlaksananya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Terlaksananya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Terlaksananya layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat

Adapun Pohon Kinerja Kecamatan Buayan dapat dilihat pada diagram berikut:

### **POHON KINERJA**

POHON KINERJA KECAMATAN BUAYAN



### 3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Outcome	CSF	Output	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buayan
	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum, keuangan dan kepegawaian		Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
		Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
		Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terlaksananya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Terlaksananya layanan Perencanaan, Penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun daerah yang disusun (Renja, rka, dpa, rkap, dppa, RKO)
		Terlaksananya layanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi perangkat Daerah yang disusun (LKJiP, LKPJ, LPPD, Sakip, Dalev, SPIP)

		Terlaksananya ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan
		Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Administrasi keuangan (GU, TU, LS, UP)	Jumlah Dokumen fasilitasi pengelolaan
	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Buayan		Indeks kondusifitas Kecamatan
		Terlaksananya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri		Persentase Desa dengan indek Desa membangun kategori maju dan mandiri
		Terlaksananya layanan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan Pemerintahan Desa
		Terlaksananya layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat	Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat



No	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Program Urusan	Sub-Indikator	Target	Realisasi	Tipe	Tahun Pelaksanaan										Rencana								
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028							
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7 Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	2.862.000	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1	Penyediaan Barang cetak dan pengandaan	%	24,12%	24,12%	24,13%	27,63%	10,36%					42,91%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>							
					1 Pelaksanaan kegiatan cetak dan pengandaan	Paket	1														100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>				
	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8 Penyediaan Bahan Material ( Alat Tulis Kantor )	9.000.000	Jumlah Bahan Paket/Material yang disediakan	1	Penyediaan Bahan Paket yang disediakan	%	25,19%	27,12%	31,33%	16,36%	16,76%					66,53%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>							
					1 Pelaksanaan kegiatan penyediaan Bahan Material	Paket	1														100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.700.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Pelaksanaan koordinasi kegiatan Rapat Dinas biasa - dan Luar daerah	%	0%	40%	20%	40%	0%					0%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>							
					1 Pelaksanaan kegiatan koordinasi Rapat Dinas biasa dan luar daerah	Laporan		1	1	1											0%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>				
	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Pelaksanaan kegiatan Kantor Alat Tulis/Bahan Lainnya	%	0%	99,00%	0%	0,10%	0%					0%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>							
					1 Pelaksanaan kegiatan Kantor Alat Tulis	dokumen		1													0%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>				
5	Tertaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	9.270.000	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya	1	Pengadaan Computer	%	0%	0%	0%	100%	0%					0%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>							
					1 Pelaksanaan kegiatan pengadaan Komputer	Unit									1						0%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>				
6	Tertaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Kegiatan Kantor Benda Pos	%	31,62%	22,73%	22,72%	22,30%	20,46%					64,27%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>							
					1 Pelaksanaan kegiatan penyediaan Benda Pos		1								1						100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>				
	Jumlah laporan Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18.960.000	Jumlah laporan Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Pelaksanaan Kegiatan tagihan Telephon, Listrik, dan Air	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>						
							1 Pelaksanaan kegiatan pembayaran tagihan Telephon	kali	1								1						100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>		
							2 Pelaksanaan kegiatan pembayaran tagihan Listrik	kali	1									1						100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>	
							3 Pelaksanaan kegiatan pembayaran tagihan Air	kali	1										1					100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14 Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	26.700.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	1	Pelaksanaan Kantor Perabot Kantor	%	25,05%	26,06%	26,45%	24,44%	17,42%					68,54%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>							
					1 Pelaksanaan Kegiatan Kantor Perabot Kantor - Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	Laporan/ bulan	1									1					100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>				
7	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.422.000	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	16	Pelaksanaan Kegiatan fasilitas Pemilu, Kegiatan Operasional Kantor Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, Belanja Suku Cadang, Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan, Belanja Asuransi Milik Daerah, Pemeliharaan Dinas,	%	32,30%	27,13%	19,88%	20,60%	32,30%						100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>						
							1 Pelaksanaan kegiatan fasilitas Pemilu	Unit	1									1					100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>		
							2 Pelaksanaan kegiatan Operasional Kantor kendaraan Roda 4 dan Roda dua	Unit	1										1					100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>	
							3 Pelaksanaan kegiatan pengadaan suku cadang	Unit	1											1					100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>
							4 Pelaksanaan kegiatan Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	Unit	1												1				100%	<a href="#">https://sibip.kabupatenkudus.go.id/</a>
							5 Pelaksanaan kegiatan belanja asuransi Milik Daerah	Unit	1													1				100%



KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN BUAYAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				REALISASI				CAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG	KET (Faktor Keberhasilan / Permasalahan dan Solusi)	
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Tertaatannya Perencanaan, Penganggaran dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA, DPPA dan RKAP)	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.530.000	Jumlah dokumen perencanaan yang terusun	5	Penyusunan dokumen RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renja	%	25,88%	30,55%	18,36%	24,21%	25,88%	100%								Kasubag PK		
								1 Penyusunan dokumen RKA	dokumen	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								2 Penyusunan dokumen DPA	dokumen	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								3 Penyusunan dokumen RKAP	dokumen		1		1										<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								4 Penyusunan dokumen DPPA	dokumen		1		1										<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								5 Penyusunan dokumen RENJA	dokumen	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
		Jumlah dokumen LPPD, LKJIP, LKJIP, SAKIP, Lap. Keuangan Simalalev	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja perangkat daerah	5	Penyusunan dokumen LPPD, LKJIP, SAKIP, Lap. Keuangan, Simalalev	%	42,48%	23,41%	34,10%	0,01%	31,27%	73,81%										
								1 Penyusunan dokumen LPPD	dokumen				1										<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								2 Penyusunan dokumen LKJIP	dokumen	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								3 Penyusunan dokumen SAKIP	dokumen	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								4 Penyusunan dokumen Laporan Keuangan	Laporan	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								5 Penyusunan dokumen Simalalev	Laporan	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
2	Tertaatannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.556.490.000	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan	12	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan	%	22,60%	27,38%	27,38%	22,64%	21,87%	85,88%										
								1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	12 bulan	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	17.116.000	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	4	Penyediaan dokumen administrasi keuangan	%	22,60%	27,38%	27,38%	22,64%	10,81%	48,50%										
								1 Pengelolaan BMD		1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								2 Pengelolaan Rakor POP	dokumen	1	1	1	1	1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								3 Juran Asuransi	laporan	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
								4 Jaminan Asuransi Kematian bagi Non ASN		1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
3	Tertaatannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.596.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Penyediaan Dokumen SPJ Keuangan	%	37,20%	12,81%	12,81%	37,18%	33,37%	88,70%										
								1 Penyediaan Makan minum Rakor Kades dan Sekdes	kali	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	2.592.000	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	%	24,12%	24,12%	24,13%	27,63%	24,12%	100%										
								1 Bahan cetakan dan penggandaan	Paket	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Bahan Material	9.000.000	Jumlah Bahan Paket/Material yang disediakan	12	Penyediaan Bahan Paket yang disediakan	%	25,19%	27,12%	31,33%	16,36%	14,48%	87,42%										
								1 Kegiatan Kantor -Alat Kantor	Paket/ Bulan	1				1	100%								<a href="#">https://siptanjabung.com</a>		



PENANGGUNGJAWAB  
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

MILA ERRAWATI, SE  
Pusat Mada TK. I / III b  
NIP 19691025 200701 2 030





PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TW I TAHUN 2024  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN BUAYAN

D	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				REALISASI				CAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG	KET (Faktor Keberhasilan / Permasalahan dan Solusi)	
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Terlaksananya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Program Penyelenggaraan dan Pemerintahan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.144.320.000	Jumlah laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (LPJU, JUT, E-Warung, Kapasitas Kelembagaan Desa)	%	0%	0%	100%	0%	0%				0%						Kasi PM	
								1 Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : LPJU	Laporan			1		0%				0%							
								2 Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : JUT	Laporan			1		0%				0%							
								3 Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : E-Warung	Laporan			1		0%				0%							
								4 Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : Kapasitas Kelembagaan Desa	Laporan			1		0%				0%							
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.368.000	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Pelaksanaan Musrengbangcam	%	0%	0%	0%	100%	0%				0%							
								1 Pelaksanaan kegiatan Musrengbangcam	dokumen				1	0%				0%							
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	48.100.000	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	Pelaksanaan kegiatan Bumdes, Kepemudaan, PKK, UKS	%	25,51%	34,30%	25,02%	14,57%	23,71%				82,84%							
								1 Pelaksanaan Kegiatan Bumdes			1														
								2 Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan			1														
								3 Pelaksanaan Kegiatan TP PKK		1								100%						100% 19/00118 199003 1 005	
								4 Pelaksanaan Kegiatan UKS			1														



PENANGGUNGJAWAB  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUK WAHYUNI, SH, M.Si  
Kabupaten / IV a  
NP 19/00118 199003 1 005

PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TW I TAHUN 2024  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN BUAYAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				REALISASI				CAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG	KET (Faktor Keberhasilan Permasalahan Sosial)	
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Tertelaksananya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Program Penyelenggaraan dan Pemerintahan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.144.320.000	Jumlah laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (LPJU, JUT, E-Warung, Kapasitas Kelembagaan Desa)	%	0%	0%	100%	0%	0%				0%							
								1 Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : LPJU	Laporan			1			0%				0%						
								2 Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : JUT	Laporan			1			0%				0%						
								3 Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : E-Warung	Laporan			1			0%				0%						
								4 Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan : Kapasitas Kelembagaan Desa	Laporan			1			0%				0%						
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		14.388.000	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Pelaksanaan Musrengbangcam	%	0%	0%	0%	100%	0%					0%						
								1 Pelaksanaan kegiatan Musrengbangcam	dokumen				1		0%				0%						
	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		48.100.000	Jumlah Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	Pelaksanaan kegiatan Bumdes, Kepemudaan, PKK, UKS	%	25,51%	34,30%	25,02%	14,57%	23,71%					82,94%						
								1 Pelaksanaan Kegiatan Bumdes				1													
								2 Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan				1													
								3 Pelaksanaan Kegiatan TP PKK				1							100%						
								4 Pelaksanaan Kegiatan UKS				1													



PENANGGUNGJAWAB  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

*[Signature]*  
SURATMAN, SH, M.Si  
Pembina / IV a  
NIK 19700118 199003 1 005

**PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TW I TAHUN 2024**  
**KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BUAYAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	Satuan	TARGET TRIWULAN				REALISASI				CAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB	LINK BUKTI DUKUNG	KET (Faktor Keberhasilan / Permasalahan dan)	
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48.974.000	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Pelaksanaan kegiatan Bimtek, Rakor Penyusunan APBDes, Rakor Penyusunan LPPDU/KPJ, Rakor Penyusunan Perubahan APBDes, Rakor Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.	%	23,85%	25,46%	24,98%	25,66%	19,46%					81,59%					Kasi TAPEM	
								1 Pelaksanaan kegiatan Bimtek Rakor Penyusunan APBDes	Dokumen				1												
								2 Rakor Penyusunan APBDes	Dokumen			1													
								3 Rakor Penyusunan LPPDU/KPPD	Dokumen	1				1					100%					<a href="#">https://www.kecamatanbuayan.kebumen.go.id/</a>	
								4 Rakor Pertanggungjawaban Realisasi APBDes	Dokumen	1				1					100%					<a href="#">https://www.kecamatanbuayan.kebumen.go.id/</a>	
2	Terlaksananya pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.000.000	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Pelaksanaan kegiatan Bimtek	%	0%	99,90%	0,01%	0%	0%					0%						
								1 Pelaksanaan kegiatan Bimtek Perangkat Desa 20 Desa	Dokumen		1								0%						

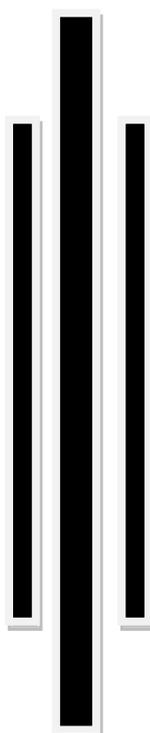


CAMAT BUAYAN  
  
**WIWIT SETYADI ARISUSANTO, SE**  
 Penata TK. I / III d  
 NIP. 19670211 198607 1 001

**DATA DUKUNG TINDAK LANJUT  
POINT 2**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN KINERJA**



Jln. Karangbolong No.59 Buayan Telp.(0287) 472190 Pos 54474  
Email : [pelayanankec.buayan@gmail.com](mailto:pelayanankec.buayan@gmail.com)  
Website : <https://kec.buayan.kebumenkab.go.id>

## **LATAR BELAKANG**

### **I. Latar Belakang**

Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada institusi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan knowledge management di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang di yakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

### **II. TUJUAN**

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja.
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

### **I. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja memuat ketentuan mengenai :

1. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan
2. Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja.
3. Tindaklanjut dari hasil evaluasi kinerja.

### **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### III. DEFINISI

1. **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan;
2. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator - indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
4. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian;
6. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
7. **Pelaporan Data Kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

### IV. PERSYARATAN UMUM

1. Perjanjian Kinerja.
2. Form Evaluasi Kinerja.

## **V. KRITERIA KEBERHASILAN**

Apabila capaian kinerja telah memenuhi/melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

## **VI. DOKUMENPELENGKAP**

PerjanjianKinerja

Renstra

LaporanKinerjaInstansiPemerintah(LKjIP)

Kuesioner Kepuasan Pelanggan

Dokumen hasil penilaian SAKIP

## **VII. PROSEDUR**

### **Prosedur Pengumpulan Data Kinerja**

1. Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja.
2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP Kantor Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data.
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data.
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja.
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja di distribusikan kepada Sekretariat dan Kasi.
7. Sekrateriat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP.
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja.
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris.
10. Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
11. Sekretaris melaporkan data kinerja kepada Camat Buayan Kabupaten Kebumen.
12. Menyimpan data kinerja.

### **Prosedur Pengukuran Kinerja**

1. Camat Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja.

2. Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja.
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART.
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan.
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris.
8. Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
9. Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat Buayan Kabupaten Kebumen
10. Menyimpan data kinerja.

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUKURANKINERJA						MUTU BAKU			
		CAMAT	SEKRETARIAT	KASI	TIM SAKIP	STAF	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Camat Buayan memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat denganTim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen Rapat	120menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap- tiap tujuan/sasaran/program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART						Juknis Pengukuran Kinerja Menpan RB RENSTRA , IKU Program Kerja Kegiatan	120menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
5	Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	1 hari	Kertas Kerja PengukuranKinerja	
6	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap- tiap tujuan/sasaran/program/kegiatan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	120 menit	Rekapitulasi Hasil PengukuranKinerja	

7	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris					Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	
8	Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.					Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	90 menit	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	
9	Sekretaris melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat Buayan.				<b>TIDAK</b>	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30menit	Disposisi Camat	
10					<b>YA</b>	Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja			

**CAMAT BUAYAN**  
  
**NUR WAHYUDI, SH**  
 Penata Tk.I  
 NIP 19800110 201101 1 006

NO	URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA						MUTU BAKU			
		CAMAT	SEKRETARIAT	KASI	TIM SAKIP	STAF	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Camat Buayan memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program Kerja Keg. RENSTRA, IKU, Hasil Survey, Lap. Hasil Evaluasi, SAKIP Menpan RB	1 hari	Checklist Dokumen	
5	Tim SAKIP menyiapkan formulir Pengumpulan data capaian kinerja						Draft Formulir pengumpulan data capaian kinerja	120 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Kasi						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	5 menit	Bukti Tanda Terima formulir	

7	Sekretariat dan Kasi dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP						Blangko formulir pengumpulandata capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulandata capaian kinerja yang sudah diisi	
8	Tim SAKIP merekap data capaian kinerja						Formulir pengumpulan data capaiankinerjayang sudahdiisi	120menit	Rekapitulasihasil pengumpulandata kinerja	
9	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasihasil pengumpulandata kinerja	30menit	DraftLaporanHasil Pengumpulan Data Kinerja	
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan		YA	TIDAK			DraftLaporanHasil Pengumpulan Data Kinerja	90menit	Laporan hasil pengumpulandata kinerja	
11	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Camat Buayan						Laporan hasil pengumpulandata kinerja, Lembar Disposisi	30menit	DisposisiKepala Dinas	
12	Pengarsipan Data Kinerja						Arsip hasil pengumpulandata kinerja			

CAMAT BUAYAN



**NUR WAHYUDI, SH**  
Penata Tk.I

NIP 19800110 201101 1 006

**DATA DUKUNG TINDAK LANJUT  
POINT 3**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN BUAYAN

Jln. Karangbolong No.59 Buayan Telp.(0287) 472190 Pos 54474  
Email : pelayanankec.buayan@gmail.com  
Website : https://kec.buayan.kebumenkab.go.id

Buayan, 22 Januari 2025

Kepada :

Yth. Sekretariat Daerah  
KabupatenKebumen  
C/q. Bagian Organisasi Kebumen  
di-  
KEBUMEN

SURAT PENGANTAR

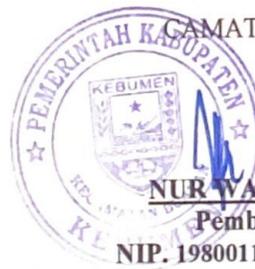
Nomor : 045.2 / 30

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Kecamatan Buayan.	1 (satu) Exemplar	Dikirim dengan hormat memenuhi Surat No : 000.8.6.3/10/2025, tanggal 7 Januari 2025, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



22-1-25

197902242007011016



KAMAT BUAYAN

NUR WAHYUDI, SH  
Pembina Tk.I

NIP. 19800110 201101 1 006